

**EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DIBERIKANNYA
OPINI AUDIT DISCLAIMER TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG
(Tahun Anggaran 2007)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh :

ADHITYA GUMAY FAJRIN

06096020



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009



No. Alumni Universitas	Adhitya Gumay Fajrin	No. Alumni Fakultas
------------------------	----------------------	---------------------

a). Tempat/Tgl.lahir: Payakumbuh, 13/08/1988 b). Nama Orang Tua: Udel Sirtama dan Mariamon. Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096020 f). Tgl.Lulus: 16 November 2009 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: i) Lama Studi : 3 tahun k) Alamat orang tua: Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, kota Payakumbuh

Evaluasi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Diberikannya Opini Audit Disclaimer Terhadap Laporan Keuangan Kota Padang

Tugas Akhir DIV oleh Adhitya Gumay Fajrin.
Pembimbing 1.Yossi Septriani, SE. M.Acc. Ak 2. Eliyanora, SE. M.Ak. Ak

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya opini audit disclaimer terhadap laporan keuangan Pemko Padang. Laporan keuangan yang diteliti adalah Laporan Keuangan Pemko Padang Tahun 2007 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemko Padang Tahun Anggaran 2007. Laporan ini menyatakan penyebab faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya opini audit disclaimer adalah kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Keterbatasan lingkup pemeriksaan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil nilai rata-rata dari masing-masing kelompok aspek penelitian dan analisis yang difokuskan kepada butir-butir pertanyaan dari setiap kelompok aspek penelitian yang perlu penekanan/pembahasan lebih lanjut. Hasil dari analisis membuktikan bahwa kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterbatasan lingkup pemeriksaan merupakan alasan penting BPK RI tidak memberikan pendapat (disclaimer) terhadap Laporan Keuangan Pemko Padang Tahun Anggaran 2007.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 November 2009.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:
Penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	Pembimbing: 4
Nama Terang	Afridian Wirahadi, SE. Ak	Anda Dwi Haryadi, SE. Ak	Gustati, SE. Ak	Yossi Septriani, SE. M.Acc. Ak

Mengetahui:
Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE. MM. Ak
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat No. Dar Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat inflasi yang terkendali, kesempatan kerja yang semakin meningkat, pengangguran yang semakin berkurang, keamanan yang kondusif, dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Pendekatan seperti itu merupakan pendekatan makro dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Wujud dari keberhasilan pemerintah yang menggunakan pendekatan makro adalah pembangunan secara fisik semakin meningkat. Ada satu pendekatan yang jarang diperhatikan oleh masyarakat adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh BPK. Untuk meningkatkan kualitas audit, BPK telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007.

Proses audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dimulai sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan berlakunya Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka tidaklah sulit bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan tanpa catatan. Pasal 70 sampai dengan pasal 78 Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Sistem Akuntansi Keuangan daerah, mengatur proses-proses untuk menghasilkan laporan keuangan. Dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Selain diatur tentang sistem akuntansi pemerintah yang sangat operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), juga diatur tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan sebelas pernyataan yang meliputi pernyataan tentang:

1. penyajian laporan keuangan
2. laporan realisasi anggaran
3. laporan arus kas
4. catatan atas laporan keuangan
5. akuntansi persediaan
6. akuntansi investasi
7. akuntansi aset tetap
8. akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
9. akuntansi kewajiban
10. koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, peristiwa luar biasa
11. laporan keuangan konsolidasian.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Berdasarkan analisis data, faktor kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Padang, menggambarkan variabel kepatuhan terhadap SAP tersebut merupakan faktor penting yang menyebabkan BPK RI memberikan opini audit discalimer. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata variabel sebesar 1.91 % yang berarti kepatuhan terhadap standar akuntansi pada Pemko Padang cukup (kurang baik).
2. Berdasarkan analisis data, faktor efektifitas sistem pengendalian intern di Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Padang, menggambarkan variabel efektifitas sistem pengendalian intern merupakan faktor penting yang menyebabkan BPK RI memberikan opini audit discalimer. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata variabel sebesar 1.93 % yang berarti efektifitas sistem pengendalian intern cukup (kurang baik).
3. Berdasarkan analisis data, faktor kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Padang, menggambarkan variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut merupakan faktor penting yang menyebabkan BPK RI memberikan opini audit discalimer. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata variabel sebesar 1.81 % yang berarti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemko Padang cukup (kurang baik).

DAFTAR PUSTAKA

- Malan, R. M, (1984) *Performance Auditing in Local Government*, Chicago, Illinois Officers Association
- Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 1995. "Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen." Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2000) "Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value For Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik," *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI)* Vol. 4 No. 1.
- Mardiasmo, (2003). "**Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**". Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Arens, A. A., Elder, R. J., dan Besley, M. S. (2003) *Auditing and Assurance Service- An Intergrater Approach*. Prentice Hall, New Jersey.
- Winda Fridati, (2005). "Analisa Hubungan Antara Profesionalisme Auditor dengan pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan Di Yogyakarta", Universitas Islam Indonesia.
- Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta : Salemba Empat.
- Suhanda, 2007, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Kedua, Padang: Penerbit Andalas Lima Sisi.
- Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Mardalis.2008. "Metodologi Penelitian Sutu Pendekatan Proposal". Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara. PT Melton Putra Jakarta.
- BPK. Oktober 2008."Laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Kota Padang Tahun Anggaran 2007."

Perundang-undangan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

